

BAB IV

KESIMPULAN

Pada bab 4 ini, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang sudah berpegangan pada pertanyaan penelitian, menggunakan kerangka pemikiran yang di buar dalam bab 1, kemudian mempertahankan data-data yang di eksplorasi pada bab 2, serta memanfaatkan analisis yang sudah dilakukan pada bab 3, Maka penelitian ini menyimpulkan :

1. Faktor Domestik sebagai pendorong internasionalisasi konflik Papua :

Isu domestik pada konflik Papua yang terjadi antara Pemerintah Indonesia yang tetap ingin mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan rakyat asli Papua (OAP, OPM di dalam negeri dan KSP, ULMWP di luar negeri) yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan, mempunyai elemen dasar kepentingan antar kedua pihak yang satu sama lain saling bertentangan dimana masing-masing pihak berpegang teguh secara prinsipil ingin mempertahankan posisi dan kepentingannya sehingga sulit dicapai resolusi damai yang menyebabkan konflik Papua tersebut terus berkepanjangan hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena ideologi yang mendasari kepentingan masing-masing pihak yang saling bertikai di dalam konflik tersebut, didasari pada pemikiran fundamental yang saling berlawanan. Dengan demikian, maka terjadi konflik ideologi antara kedua pihak. Di satu sisi, Pemerintah

Indonesia berpegang pada ideologi politik yang menjunjung tinggi dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI, sementara di sisi lain, rakyat asli Papua (OAP, KSP, ULMWP) berpegang pada doktrin yang menuntut kebebasan dalam menentukan nasib sendiri yang terbebas dari belenggu Pemerintahan Indonesia.

Sebagai konsekuensi logis dari kelangsungan situasi dan kondisi faktual tersebut di atas, maka dari waktu ke waktu, konflik Papua cenderung mengalami eskalasi dari konflik ideologi mengarah pada konflik fisik yang melibatkan tindakan militer yang dilancarkan oleh masing-masing pihak. Hal ini menandakan belum ada titik temu yang mempersatukan nilai-nilai mendasar dari kedua ideologi yang saling bertentangan tersebut. Diartikan pula bahwa masih terdapat “jurang” atau kesenjangan ideologis yang lebar antara kedua pihak dalam rangka penyelesaian konflik Papua tersebut. Masing-masing pihak masih sangat kuat tetap mempertahankan ideologinya. Dengan hal ini, maka tingkat kekuatan ideologi sangat mempengaruhi upaya penyelesaian konflik. Semakin lebar “jurang” ideology, akan membuat semakin jauh konflik dapat diselesaikan. Semakin jauh konflik dapat terselesaikan, akan menyebabkan adanya eskalasi konflik. Apabila konflik terus menerus mengalami eskalasi, dapat dipastikan akan menjurus pada berlakunya tindakan militer. Hal inilah yang faktanya sedang terjadi di Papua.

Fakta terkini yang memperlihatkan konflik Papua menjurus pada konflik fisik yang melibatkan tindakan militer oleh masing-masing pihak, tentunya akan mempengaruhi nilai-nilai dasar kenegaraan dan kemanusiaan. Dalam hal ini, dipastikan salah satu pihak yang bertikai akan merasakan bahwa eksese tindakan

operasi militer menciptakan tekanan terhadap nilai-nilai kedaulatan dan nilai-nilai kebebasan manusia. Pihak pemerintah Indonesia merasakan gangguan internal yang dapat mengancam stabilitas keamanan wilayah. Gangguan keamanan dalam bentuk tekanan militer yang dilancarkan oleh pihak OAP dan OPM dapat memicu ancaman potensial terhadap keutuhan wilayah NKRI yang apabila dibiarkan, akan mengancam kedaulatan negara. Sementara OAP merasakan tekanan militer operasi yang dilancarkan oleh aparat militer dari pihak pemerintah Indonesia dapat merusak nilai-nilai dasar kemanusiaan, hak kebebasan manusia dan hak dasar mereka untuk merdeka. Dengan kata lain, jika konflik fisik militer terus menerus berlangsung, maka tidak akan dapat dihindari dampaknya terhadap kemanusiaan.

Konflik ideologi dan konflik militer antar pihak yang bertikai di Papua di atas, disebabkan oleh 5 (lima) faktor penyebab utama, yaitu:

1. Tuntutan OAP, OPM, ULMWP dan KSP atas keabsahan New York Agreement 1962 yang mempermasalahkan masuknya Papua sebagai bagian NKRI, dan masih terdapatnya perbedaan persepsi tentang terintegrasinya Papua ke dalam NKRI melalui PEPERA 1969;
2. Kegagalan pemerintah Indonesia dalam menjalankan Otonomi Khusus yang menyebabkan belum tercapainya kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan kesehatan rakyat Papua;
3. Diskriminasi dan marjinalisasi terhadap rakyat asli Papua (OAP);
4. Perasaan traumatis dari sebagian OAP sebagai akibat tindakan represif aparat pemerintah Indonesia, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Kelima faktor tersebut merupakan faktor domestik yang bersifat domestik dan yang menjadikan isu domestik konflik Papua menjadi isu internasional karena masing-masing penyebab di dalamnya mengandung elemen-elemen “pemicu” internasionalisasi, yaitu: adanya legalitas eksistensi wilayah ex-kolonial, pelanggaran nilai-nilai universal HAM, pengaruh buruk terhadap keamanan di kawasan maupun keamanan internasional, gangguan potensial bagi penciptaan perdamaian dunia, dan adanya kekuatan yang bisa merubah pola hubungan antar negara dalam konteks aliansi dari kooperatif menjadi konfrontatif.

2. Faktor Internasional sebagai penarik internasionalisasi konflik Papua

Sedangkan faktor internasional yang menyebabkan internasionalisasi isu Papua adalah karena terdapat elemen-elemen eksternal yang menjadi trend terkini, sebagai berikut:

1. Agenda internasional yang memfokuskan pada penegakan HAM secara universal;
2. Pentingnya aspek legalitas pengakuan internasional terhadap eksistensi wilayah ex-kolonial;
3. Pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek kesejahteraan manusia;
4. Peran aktor non-negara (NSA) yang semakin menguat dan berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan norma-norma internasional;
5. Transparansi informasi secara terbuka dan meluas, didukung dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi cenderung digunakan sebagai “alat” untuk mencapai tujuan oleh pihak-pihak tertentu.

Dari perpaduan elemen-elemen di dalam faktor pendorong dengan elemen-elemen di dalam faktor penarik tersebut di atas, dapat terlihat bahwa isu domestik konflik Papua mempunyai elemen-elemen tertentu yang dapat memunculkan spill-over effects sehingga terdapat eksesi yang menyebabkan konflik Papua mengalami pergeseran lingkup, dari lingkup isu domestik menjadi isu yang lingkungannya melampaui batas-batas negara dan menjadi isu internasional.

Internasionalisasi isu domestik konflik Papua akan semakin gencar dan berpotensi menjurus pada agenda permanen dalam pembahasan internasional atau sebaliknya internasionalisasi isu Papua dapat diredam dan dibatasi lingkup eksesnya agar tidak mengarah menjadi internasional, dengan sangat bergantung pada dinamika lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang ditentukan oleh strategi dan taktik masing-masing pihak yang bertikai dalam pencapaian tujuan dan kepentingannya. Namun demikian, masing-masing faktor ketergantungan pada dinamika lingkungan internal dan lingkungan eksternal serta strategi tersebut, telah menciptakan tali lingkaran bersambung yang tidak terputus, mulai dari konflik Papua secara domestik yang mencuat hingga dibahas isunya oleh sejumlah pihak di luar negeri, baik dalam kerangka regional maupun internasional, hingga terjadi internasionalisasi isu Papua yang kepesatan bahasannya sangat ditentukan pada dinamika konflik di dalam Papua itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Angstrom, Jan. *Review Article: The International Dimensions of Ethnic Conflict*. Studies in Peace and Terrorism. United Kingdom: Taylor and Francis, 2001.
- Alua, Agus A. *Dialog Nasional Papua dan Indonesia: 26 Februari 1999: Kembalikan Kedaulatan Papua Barat, Pulang dan Renungkan Dulu*. Sekretariat [i.e. Sekretariat] Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2002.
- Borda, Sandra P. *The Internationalization of Domestic Conflicts: A Comparative Study of Colombia, El Salvador and Guatemala*. Minneapolis, USA. Doctorate of Philosophy: The University of Minnesota, 2009.
- Brown, Michael E. *The International Dimensions of internal conflict*. Cambridge, MA : MIT Press, 1996.
- Burton, John. *Resolving Deep Rooted Conflict*. Lanham/Maryland : University Press of America, 1987.
- Cahyo Pamungkas. *Updating Papua Road Map*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, LIPI: Jakarta, 2017.
- Creswell, John W. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California, United States. SAGE Publications. 2003.
- David A. Lake and Donald Rothchild. *The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion, and Escalation*. New Jersey: Princeton University Press, 1998.
- E. Azar. *Protracted Social Conflict : An Analytical Framework*. Aldershot : Dartmouth.Hlm 5, 1990.
- Forum Akademisi untuk Papua Damai (Sudira, I Nyoman dan Situmorang, Mangadar) .*Oase Gagasan Papua Damai*. Jakarta: Imparsial, 2012.
- Kivimaki, Timo. *Intiating A Peace Process in Papua : Actors, Issues, Process, and The Role of The International Community*. Washington, D.C.: East West Center, 2006.
- Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver dan Woodhouse, Tom. *Contemporary Conflict Resolution: Third Edition*. United Kingdom: Polity, 2011.
- Ondawame, Otto. *One people, one soul : West Papuan Nationalism and the Organisasi Papua Merdeka*. Canberra, Australia. Crawford House Publishing: Australian National University (ANU), 2000.
- Rumkabu, Elvira. *Oase Gagasan Papua Bermartabat*. Jakarta: Imparsial.
- Ryan, Stephan. *Approaches to Ethnic Conflict :Ethnic Conflict and International Relations*. London, England :Dartmouth Publishing Company; Subsequent Edition, 1995.
- Saltford, John. 2003. *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua 1962-1969: .* London and New York. Routledge Curzon : Taylor and Francis Group, 2003.

- Siregar, Latifah Anum. *Menuju Papua Tanah Damai, Perspektif Non-Papua*. Jayapura, Papua Aliansi Demokrasi untuk Papua, 2013.
- Syamsuddin Ishak, Otto dan Sudira, I Nyoman. 2012. *Oase Gagasan Papua Damai*. Imparsial Jakarta, Indonesia. 2012.
- Tebay, Neles Keadabi. *Papua Case in the Eyes of the European Commission :Angkat Pena Demi Dialog Papua*. Jakarta : Institut Dian/Intefidei, 2001-2011.
- Teja, Mohammad. Konflik Papua dan Masalah Kesejahteraan Masyarakat.
- Widjojo Muridan. (ed). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present. And Securing the Future*, Jakarta: LIPI. Yayasan Tifa dan Obor Indonesia, 2009

JURNAL

- Amnesty International*. "Indonesia : Impunity and Human Rights Violations in Papua". Reliefweb. 2004. Diakses melalui <https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-impunity-and-human-rights-violations-papua>
- Anari John. "Kegagalan Dekolonisasi dan Ilegal Referendum di Papua Barat". West Papua Liberation Organisation (WPLO). (2011). Diakses melalui <https://anzdoc.com/john-anari-kegagalan-dekolonisasi-dan-ilegal-referendum-di-p.html>
- Baiq L.S.W. Wardhani. "Quo Vadis Melanesian Spearhead Group?". Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga. *Global & Strategis*, Th. 9, No.2. Diakses melalui <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs4fdf7bcf272full.pdf>
- Bekarekar, Wirda Wanda Sari. "Alasan Indonesia Melakukan Hubungan Kerjasama dengan Melanesian Spearhead Group (MSG)". Magister Ilmu Hubungan Internasional: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). (2016) Diakses melalui <http://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/32-wirda.pdf>
- Cohen, Robin. "International Affairs: Diasporas and the State : From victims to challengers". Vol. 72 No. 3. 1996. Oxford University Press : Royal Institute of International Affairs. Diakses melalui <https://www.jstor.org/stable/2625554>
- Elmslie Jim. "West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: Slow Motion Genocide or not?". .For Comprehending West Papua Conference. Sydney University, (February 23-24, 2011). Diakses melalui https://sydney.edu.au/arts/peace_conflict/docs/working_papers/West_Papuan_Demographics_in_2010_Census.pdf

- Elisabeth Adriana. “Dimensi Internasional Kasus Papua”. E-Journal Politik LIPI. 2016. Diakses melalui <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/422/236>
- Enggar Dwi Ammy JF. “Strategi Media Relations Divisi Penerangan Sosial Budaya (PENSOSBUD) KBRI Australia Terkait Pemberitaan Kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM).” Surabaya, Indonesia : Universitas Airlangga. Diakses melalui <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/commb949a9f2fbfull.pdf>
- H. Muhammad. “Dinamika Konflik dan Pelanggaran HAM di Papua”, Universitas Muhammadiyah Malang. (2017). Diakses melalui <http://eprints.umm.ac.id/36180/2/jiptummpp-gdl-habibiemuh-48919-2-babi.pdf>
- McDonell Michael. “The Racial Division of Labour in the Global Political Economy”. Directed Readings in Sociology – Final Paper. British Columbia, Canada. Labour Studies, Simon Fraser University. 2012. Diakses melalui http://www.academia.edu/1863721/The_Racial_Division_of_Labour_in_the_Global_Political_Economy
- Mutaqin Azmi. “Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan Papua, E-journal UNDIP (online)”. Vol 4, No 1 tahun 2014. Diakses <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/6064>
- Ngatiyem. “Organisasi Papua Merdeka (OPM) 1964-1998”. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. (2007). Diakses melalui <https://eprints.uns.ac.id/5587/>
- Richard Chauvel dan Ikrar Nusa Bakti. “The Papuan Conflict : Jakarta’s Perception and Policies. Policy Studies 5”. Washington D.C : East West Center Washington. 2004. Diakses melalui <https://www.eastwestcenter.org/publications/papua-conflict-jakarta%E2%80%99s-perceptions-and-policies>
- Rycho Korwa. “Proses Integrasi Irian Barat ke Indonesia”. *E-Journal Universitas Sam Ratulangi*. Vol. 5, No. 1. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/1567/1260>
- Situmorang, Mangadar. *Facilitative Mediation On The Impasse In Papua. Vol. 11 No.1: Jurnal Administrasi Publik*. Diakses melalui <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/976/959>.
- Yolisandri Ringgi Wanggae , Hipolitus. “No End To Violence In Papua?”. Indonesia at Melbourne. . 2017. The University of Melbourne. Diakses melalui <http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/no-end-to-violence-in-papua/>

SITUS WEB

- “Agreement: Establishing The Melanesian Spearhead Group”. Diakses melalui www.msgsec.info/index.php/publication/reports?download=3%3Amsg-agreement .
- Affan, Heyder. “Janji Penyelesaian 11 Pelanggaran HAM di Papua”. Diakses melalui http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160518_indonesia_ham_papua
- Hasan, Akhmad Muawal. “Dukungan Internasional untuk Papua Merdeka”. Diakses melalui <https://tirto.id/dukungan-internasional-untuk-papua-merdeka-cu9o>.
- Karafir, Alfred. “Negara-negara Pasifik Semakin Tahu Kebobrokan ULMWP”. Diakses melalui: <https://pauanews.id/2017/08/08/negara-negara-pasifik-semakin-tahu-kebobrokan-ulmwp/> .
- Mahyuddin. “Kolonialisme Internal : Dominasi Elit dan Dinasti Politik di Tingkat Lokal”.. Diakses melalui <https://www.edunews.id/literasi/opini/kolonialisme-internal-dominasi-elit-dan-dinasti-politik-tingkat-lokal/>
- Melanesian Spearhead Group Secretariat. “Who We Are?”. Diakses melalui <http://www.msgsec.info/index.php/who-we-are>.
- Organisasi Pribumi Papua Barat (OPPB). “Operasi Militer di Papua”. Diakses melalui: http://www.oocities.org/west_papua/about.htm.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Deklarasi Tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara Kolonial dan Masyarakat, Referensi HAM. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM): Referensi HAM”. Diakses melalui <http://referensi.elsam.or.id/2014/10/deklarasi-tentang-pemberian-kemerdekaan-kepada-negara-kolonial-dan-masyarakat/>
- Tony, F. “Ribuan Tahun Orang Melanesia di Indonesia”. Diakses melalui <https://tirto.id/ribuan-tahun-orang-melanesia-di-indonesia-bEYN>
- Wardah, Fathiyah. “Survei LIPI : Pelanggaran HAM persoalan terbesar di Papua”. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/survei-lipi-pelanggaran-ham-persoalan-terbesar-di-papua/4164959.html>.

SEMINAR

- Sudira, I Nyoman. *Seminar Resolusi Konflik Papua melalui Pendekatan Perdamaian*. Makalah disajikan dalam rangka membahas perdamaian Papua dengan cara dialog, LIPI, Imparsial, Universitas Katolik Parahyangan. 2018.

KORAN

- Tarere, Winston. 2012. ‘Papuan Separatists seek Vanuatu Support to Join Regional Group’. *Vanuatu Daily Post Newspaper*. 8 July.

DOKUMEN LAINNYA

Taylor, Rob. *ASIA: Australians supporting Papuan separatism compiled on list*. South East Asia Correspondent. Dokumen resmi dari KBRI Canberra, Australia.

Personil ULMWP dan Alasan Partisipasinya. 2018. Dokumen dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia.

Model Strategi Pergerakan ULMWP. 2018. Data dari KBRI Canberra, Australia.

United Nations Treaties. 1976. 'Multilateral: International Covenant on Civil and Political Rights : Adopted by the General Assembly of the United Nations'. Vol.999, No.14668. hlm 173

WAWANCARA

Wawancara dengan narasumber Bapak Siswo Pramono, selaku Ketua Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 27 Februari